

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan. Secara umum ada tiga bentuk laporan keuangan yang pokok dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan-laporan keuangan tersebut pada dasarnya ingin melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan: kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan operasional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. 2009:12). Suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh seorang akuntan harus memerlukan seorang auditor untuk dapat memeriksa laporan keuangan tersebut apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk (Arens,2008;4).

Pengauditan dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan audit. Laporan audit dikenal juga sebagai opini audit yang merupakan puncak dari proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang cukup dan kompeten yang berhubungan dengan penyajian yang wajar dari suatu laporan keuangan. Menurut Standar Audit (SA) (700:2) menjelaskan bahwa tujuan auditor melakukan audit yaitu untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang di peroleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut.

Seorang auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang harus dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan opini yang tepat. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya untuk selanjutnya digunakan oleh para pemakai laporan keuangan sebagai acuan dalam membaca sebuah laporan keuangan.

Bagi BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan BPK RI dalam mengungkap dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Opini yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah merupakan indikator kinerja dan keberhasilan pemerintah dalam

melaksanakan, menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, transparan dan akuntabel.

Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, juga menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah daerah pada dasarnya harus diaudit oleh BPK. Tugas dari Badan Pemeriksaan Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Melihat pentingnya informasi keuangan tersebut dan agar informasi ini dapat dipercaya oleh pengguna informasi maka diperlukan pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. UUD 1945 menciptakan BPK sebagai lembaga tinggi negara dengan tugas pokok melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik berupa stok asetnya maupun transaksi dalam membelanjai kegiatannya. BPK memeriksa keuangan negara di semua lapisan tingkat pemerintahan di Indonesia.

Standar pekerjaan lapangan mengatur mengenai prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan, seperti adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat

atas laporan keuangan. Seorang akuntan publik juga dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan di luar perusahaan, sehingga dapat menghasilkan opini auditor yang tepat dan dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan.

Suatu hasil opini audit yang dihasilkan oleh seorang auditor tidak terlepas dari etika auditor. Menurut Louwers (1997) dalam Kushasyandita (2012:3) menjelaskan bahwa etika professional dibutuhkan oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit. Masyarakat sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

Menurut Mulyadi (1998:45) dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika professional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menjelaskan jasa tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya pada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi.

Auditor sebagai profesi yang dituntut atas opini laporan keuangan perlu menjaga sikap profesionalnya. Untuk menjaga profesionalisme auditor perlu dituntut etika profesional. Menurut Abdul (2008:31) dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standar

dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota.

Hasil opini auditor tidak hanya terlepas dari etika yang dimiliki oleh seorang auditor tetapi seorang auditor juga harus mempunyai sikap skeptisme profesional yang baik. Pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih sikap skeptisisme profesional auditor. Menurut Maghfirah dan Syahril (2008) menjelaskan bahwa skeptisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit dan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung atau membuktikan asersi manajemen. Sikap skeptis dari auditor ini diharapkan dapat mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Kemahiran profesional auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga secara tidak langsung skeptisisme profesional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik.

Seorang auditor yang memiliki skeptisisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Menurut Noviyanti (2008) dalam Kushasyandita (2012:3) menjelaskan bahwa auditor harus menyadari bahwa kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan bisa saja terjadi. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat. Seorang auditor harus

memiliki sikap skeptisme profesionalnya dalam mengumpulkan bukti audit. Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik.

Pada penelitian ini terdapat fenomena yang terjadi yaitu, Prestasi membanggakan diraih oleh empat Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat dalam hal penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. “Opini WTP bukan merupakan pemberian dari BPK. Namun, opini WTP merupakan hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, Saya ucapkan selamat kepada empat pemerintah daerah yang pada hari ini berhasil memperoleh opini WTP,” kata Kalan dalam sambutannya. Tetapi dari penggambaran di atas terdapat kasus fenomena yaitu beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD TA 2014 di hampir seluruh Pemda yaitu tentang :

1. Penatausahaan aset tetap yang belum tertib diantaranya tanah pemda yang belum bersertifikat dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
2. Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil.
3. Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid.

4. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut. Khususnya yang diterima Pemda dari BPJS Kesehatan pada periode Januari s.d. April 2014 atau sebelum terbitnya Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.
5. Keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh Pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda.

**Sumber :** <http://bandung.bpk.go.id/?p=7626>

Berdasarkan kasus fenomena di atas, peneliti juga melakukan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arfin Adrian,2013) dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, Dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau) yang memberikan kesimpulan bahwa skeptisme profesional, etika, pengalaman, dan keahlian audit berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh (Sulastri Mayang,2014) dengan Judul Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Dan *Audit Judgment* Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit Atas Laporan Keuangan (Studi Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo) yang memberikan kesimpulan bahwa skeptisme profesional auditor dan *audit judgment* berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh (Astari Bunga Pratiwi, 2013) dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor Skeptisme Professional Auditor Terhadap

Pemberian Opini yang menjelaskan bahwa etika tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini melalui skeptisme professional auditor.

Berdasarkan uraian penelitian di atas menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaruh variabel-variabel. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk menyusun dan meneliti kembali dengan melihat dari beberapa jurnal dan melihat dari fenomena yang ada dengan judul dalam skripsi ini, yaitu: **“Pengaruh Etika Profesi dan Skeptisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor ”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang baiknya etika seorang auditor, dan berdasarkan latar belakang dan tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh etika profesi dan skeptisme professional terhadap ketepatan pemberian opini auditor.

1. Terdapat kelemahan atas etika profesi dan skeptisme professional seorang auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti audit sehingga masih banyak ditemukan permasalahan dari hasil opini laporan keuangan yang telah diterbitkan.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Etika Profesi Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Skeptisme Profesional Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Ketepatan Pemberian Opini Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi dan Skeptisme Professional terhadap Ketepatan Pemberiaan Opini Auditor Baik Secara Parsial Maupun Simultan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Etika Profesi Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Skeptisme Profesional pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui Ketepatan Pemberian Opini Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi Auditor dan Skeptisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberiaan Opini Auditor.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis sendiri khususnya. Adapun kegunaan operasional dan teoritis yang ingin dicapai dan memberikan kontribusi pada Auditor BPK adalah sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Praktis**

##### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini berguna untuk mengetahui dan memahami perbandingan antara konsep dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapannya di beberapa perusahaan dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melatih kemampuan analisis berpikir secara sistematis dan konseptual.

##### **2. Bagi Auditor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para auditor untuk dapat bekerja dengan baik dan tepat dalam menyajikan laporan keuangan yang harus sesuai dengan etika profesi seorang auditor dan harus bersikap skeptisme profesional.

### 3. Bagi BPK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja auditor BPK dalam menerbitkan opini bagi dengan etika profesi dan skeptisme profesional yang baik dan tepat.

#### **b. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kondisi ketepatan pemberian opini oleh auditor serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.